



PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH MELALUI BANK SAMPAH DI DESA BULUSULUR KECAMATAN WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI

Defva Fransisco Fortunata¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran pemerintah Desa Bulusulur dalam pengawasan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Induk Bina Tata Praja di Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah memerlukan peran dan pengawasan yang optimal dari pemerintah desa agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi terhadap informan yang meliputi kepala desa, perangkat desa, pengelola bank sampah, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bulusulur telah menjalankan perannya dalam fasilitasi, pembinaan, dan koordinasi pengelolaan bank sampah melalui penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah. Namun berdasarkan teori peran Soekanto, pengawasan yang dilakukan masih bersifat pasif dan partisipatif, belum mencapai peran aktif yang optimal. Pengawasan masih bersifat administratif, tidak rutin, dan belum terstruktur dalam mekanisme yang baku. Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, sumber daya manusia aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya koordinasi dan evaluasi berkala. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah desa melalui pengawasan yang lebih terstruktur, sistematis dan berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur, alokasi anggaran khusus, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Pengawasan, Bank Sampah, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This study analyzes the role of Bulusulur Village Government in supervising waste management through the Bina Tata Praja Waste Bank in Wonogiri District, Wonogiri Regency. Community-based waste management through waste banks requires optimal role and supervision from the village government to ensure sustainability. This research employs a qualitative method with a descriptive approach through in-depth

interviews, field observations, and documentation studies involving informants including village heads, village officials, waste bank managers, and community members. The results indicate that the Bulusur Village Government has performed its role in facilitating, fostering, and coordinating waste bank management through the establishment of Village Regulations on Waste Management. However, based on Soekanto's role theory, the supervision conducted remains passive and participatory, not yet reaching optimal active role. Supervision is still administrative in nature, not routine, and not yet structured in standard mechanisms. The constraints faced include limited budget, human resources of village apparatus, low community participation, and weak coordination and periodic evaluation. This study recommends strengthening the village government's role through more structured, systematic and sustainable supervision, capacity building of apparatus, special budget allocation, and development of integrated monitoring and evaluation systems to improve the effectiveness of community-based waste management.

Keywords: Village Government Role, Supervision, Waste Bank, Waste Management, Community Participation.

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan isu lingkungan yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah pedesaan. Sampah rumah tangga menjadi penyumbang terbesar dalam total volume sampah yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, dan penurunan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan sampah yang efektif menjadi kebutuhan mendesak, termasuk melalui pendekatan berbasis masyarakat seperti bank sampah yang telah berkembang di berbagai daerah sebagai alternatif solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Bank sampah merupakan salah satu inovasi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat di mana sampah anorganik yang masih bernilai ekonomis dikumpulkan, dipilah, dan ditabung layaknya sistem perbankan konvensional. Konsep ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui sistem tabungan sampah yang dapat diuangkan. Namun demikian, keberhasilan bank sampah sangat bergantung pada dukungan dan pengawasan dari berbagai pihak, terutama pemerintah desa yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam pengawasan dan pembinaan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa kepala desa berwenang menyelenggarakan kewenangan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa, termasuk di dalamnya urusan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Peran tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah hingga ke level desa memiliki tanggung jawab dalam pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, pemerintah desa dapat menginisiasi program, mengalokasikan anggaran, memberikan edukasi, serta memastikan keberlangsungan kegiatan pengelolaan sampah secara partisipatif melalui mekanisme pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Pengawasan ini penting untuk menjamin bank sampah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan tidak mengalami stagnasi atau pembubaran karena kurangnya dukungan kelembagaan serta lemahnya sistem kontrol dan evaluasi kinerja.

Di Kabupaten Wonogiri, upaya pengelolaan sampah melalui bank sampah telah mulai diterapkan di beberapa desa sebagai bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sejenisnya. Namun berdasarkan observasi awal, pelaksanaan program bank sampah di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala dan hasilnya belum maksimal karena beberapa bank sampah berjalan aktif sementara yang lain tidak beroperasi secara optimal disebabkan kurangnya pengawasan, pembinaan, atau partisipasi masyarakat yang konsisten. Kondisi ini menunjukkan perlunya keterlibatan yang lebih kuat dari pemerintah desa dalam mengawasi dan mendorong keberlanjutan program pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui

mekanisme pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Desa Bulusulur di Kecamatan Wonogiri merupakan salah satu desa yang telah membentuk Bank Sampah Induk Bina Tata Praja sebagai wadah pengelolaan sampah berbasis masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi tantangan terkait konsistensi operasional, partisipasi masyarakat, dan yang paling krusial adalah fungsi pengawasan dari pemerintah desa yang belum berjalan secara optimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Budiyarto et al. (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan bank sampah sangat dipengaruhi oleh dukungan dan pengawasan dari pemerintah daerah dan pemerintah desa, di mana tanpa pengawasan yang baik, bank sampah cenderung stagnan atau bahkan berhenti beroperasi. Studi Anam dan Siwiendrayanti (2023) di wilayah perkotaan Semarang juga menyoroti bahwa pengawasan pemerintah berperan langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah, sementara penelitian Tundjungsari et al. (2025) menegaskan pentingnya pengawasan pemerintah dalam membangun sistem ekonomi sirkular melalui bank sampah yang tidak hanya menyangkut aspek administratif tetapi juga memastikan keberlangsungan sistem, kualitas operasional, dan keberlanjutan finansial. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik menganalisis peran pemerintah desa dalam pengawasan pengelolaan sampah melalui bank sampah dengan menggunakan kerangka teori peran Soekanto masih terbatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi empiris dan teoritis dalam memahami dinamika peran pemerintah desa di tingkat lokal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana peran Pemerintah Desa Bulusulur dalam pengawasan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Induk Bina Tata Praja, mengidentifikasi bentuk dan mekanisme pengawasan yang dilakukan, serta mengetahui kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut guna merumuskan rekomendasi strategis bagi penguatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2023) bahwa metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat interpretif dan digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan deskriptif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menggambarkan dan menganalisis peran pemerintah desa dalam pengawasan pengelolaan sampah melalui bank sampah di Desa Bulusurur secara faktual, mendalam dan sistematis tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap kondisi yang diteliti. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Bulusurur, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah yang dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa ini telah menerapkan program Bank Sampah Induk Bina Tata Praja yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan peran pemerintah desa dalam proses pengelolaan maupun pengawasan, sehingga relevan dengan fokus penelitian tentang peran pengawasan pemerintah desa dalam konteks pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Informan penelitian ditentukan secara purposive berdasarkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap pengelolaan sampah melalui bank sampah, yang meliputi Kepala Desa Bulusurur sebagai pengambil kebijakan dan penentu arah pengelolaan sampah di tingkat desa, perangkat desa yang membidangi urusan lingkungan hidup sebagai pelaksana teknis pengawasan dan pembinaan, pengurus Bank Sampah Induk Bina Tata Praja sebagai pengelola operasional yang menjalankan kegiatan sehari-hari, serta masyarakat yang menjadi nasabah bank sampah sebagai subjek program yang dapat memberikan perspektif mengenai efektivitas pengawasan dan dampak program terhadap perilaku pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang memungkinkan informan menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka

secara bebas namun tetap terarah sesuai fokus penelitian, observasi lapangan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kegiatan bank sampah mulai dari proses pengumpulan, pemilahan, penimbangan hingga pengelolaan hasil sampah daur ulang, serta bentuk pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, dan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder dari dokumen pemerintah desa seperti Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, laporan kegiatan, catatan administrasi bank sampah, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2023) yang meliputi tiga tahap utama yaitu reduksi data untuk menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan agar lebih mudah dipahami, penyajian data dalam bentuk uraian naratif yang menggambarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara sistematis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang valid dan dapat dibuktikan melalui proses verifikasi data. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan dan triangulasi metode dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan penelitian sesuai dengan prinsip validitas dan reliabilitas dalam penelitian kualitatif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Bulusulur telah menjalankan perannya dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Induk Bina Tata Praja dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum yang memberikan kerangka normatif bagi operasionalisasi bank sampah di tingkat desa. Peraturan Desa tersebut mengatur berbagai aspek penting meliputi tujuan dan prinsip pengelolaan sampah, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak termasuk pemerintah desa sebagai fasilitator dan pengawas, pengurus bank

sampah sebagai pelaksana teknis, serta masyarakat sebagai subjek utama yang memiliki hak dan kewajiban dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Keberadaan regulasi ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah desa telah memahami pentingnya kerangka kebijakan yang jelas untuk mendukung pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan telah mengambil langkah strategis dalam memberikan legitimasi kelembagaan terhadap bank sampah. Namun demikian, ketika dianalisis menggunakan teori peran Soekanto (2002) yang membagi peran ke dalam tiga bentuk yaitu peran pasif, peran partisipatif, dan peran aktif, ditemukan kesenjangan signifikan antara peran normatif yang diatur dalam Peraturan Desa dengan peran aktual yang dijalankan di lapangan.

Peran pasif Pemerintah Desa Bulusulur tercermin dari minimnya keterlibatan langsung dalam pengawasan operasional bank sampah di mana pemantauan terhadap kegiatan pemilahan, penimbangan, pencatatan, dan penjualan sampah tidak dilakukan secara rutin dan terstruktur. Hasil wawancara dengan pengelola bank sampah mengungkapkan bahwa pemerintah desa jarang melakukan pemantauan langsung dan pengawasan lebih banyak dilakukan melalui laporan lisan atau komunikasi informal tanpa adanya verifikasi lapangan secara sistematis. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa tidak terdapat jadwal pengawasan tetap yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga fungsi pengawasan berjalan secara insidental hanya ketika terdapat permasalahan tertentu atau ketika pengurus bank sampah meminta bantuan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pemerintah desa memiliki kewenangan formal melalui Peraturan Desa, dalam praktiknya pemerintah desa masih menempatkan diri pada peran pasif yang belum mampu memberikan kontrol efektif terhadap pelaksanaan program bank sampah sehingga berpotensi melemahkan fungsi pengawasan karena tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap kualitas pengelolaan sampah.

Peran partisipatif terlihat lebih dominan dibandingkan peran pasif, di mana pemerintah desa telah terlibat dalam pembentukan bank sampah, penyusunan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah, pelaksanaan

sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah, serta menjalin koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan memberikan dukungan moral kepada pengelola bank sampah. Hasil wawancara dengan Kepala Desa mengungkapkan bahwa pemerintah desa telah memfasilitasi berbagai kegiatan lingkungan yang melibatkan masyarakat seperti kerja bakti dan sosialisasi pemilahan sampah sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga dalam program pengelolaan sampah. Namun demikian, keterlibatan tersebut lebih bersifat pendukung dan motivasional bukan dalam bentuk pengawasan yang bersifat mengikat, berkelanjutan, dan memiliki mekanisme tindak lanjut yang jelas sehingga peran partisipatif yang telah berjalan belum diikuti dengan penguatan fungsi kontrol yang sistematis. Kondisi ini sejalan dengan temuan Muchsin (2021) yang menyatakan bahwa peran pemerintah desa yang hanya bersifat fasilitator tanpa disertai fungsi pengawasan aktif akan menyebabkan program berbasis masyarakat rentan mengalami penurunan kualitas dan keberlanjutan.

Peran aktif yang merupakan bentuk ideal dalam teori peran Soekanto belum terwujud secara optimal di Desa Bulusulur karena pemerintah desa belum secara konsisten melakukan monitoring rutin, evaluasi kinerja bank sampah secara tertulis dan terukur, serta belum memberikan tindakan korektif yang tegas apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan. Hasil wawancara dengan perangkat desa mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya pembagian tugas yang jelas menjadi faktor utama belum optimalnya peran aktif di mana aparatur desa harus menangani berbagai bidang pekerjaan secara bersamaan sehingga pengawasan pengelolaan sampah belum dapat menjadi prioritas utama. Selain itu, belum terdapat standar operasional prosedur pengawasan yang baku untuk kegiatan bank sampah sehingga pelaksanaan pengawasan sangat bergantung pada inisiatif personal aparatur desa bukan pada sistem yang terbangun secara kelembagaan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan antara peran ideal yang diharapkan dalam teori peran Soekanto dan peran aktual yang dijalankan di lapangan, sehingga keberadaan

Peraturan Desa sebagai dasar hukum belum secara otomatis mendorong pemerintah desa untuk menjalankan peran aktif dalam pengawasan yang seharusnya mencakup penetapan standar pengelolaan, monitoring berkelanjutan, evaluasi kinerja yang objektif, serta pemberian sanksi atau tindakan korektif untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan program.

Kondisi pengelolaan sampah di Desa Bulusulur menunjukkan bahwa meskipun Bank Sampah Induk Bina Tata Praja telah berjalan dan sebagian masyarakat telah berpartisipasi sebagai nasabah aktif yang memilah sampah dari rumah, namun partisipasi tersebut belum merata dan konsisten di seluruh wilayah desa. Hasil wawancara dengan masyarakat mengungkapkan adanya perbedaan tingkat pemahaman dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah di mana sebagian masyarakat telah memahami manfaat memilah sampah dan menabung di bank sampah karena adanya nilai ekonomi dan dampak positif terhadap lingkungan, namun sebagian masyarakat lainnya masih belum rutin berpartisipasi karena keterbatasan waktu, kurangnya kebiasaan memilah sampah sejak awal, serta belum adanya pengawasan yang tegas dari pemerintah desa dalam bentuk dorongan atau sanksi yang mendorong perubahan perilaku. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa masih ditemukan sampah rumah tangga yang tidak terpilah dengan baik dan praktik pembuangan sampah secara konvensional seperti dibakar atau dibuang tanpa pemilahan masih terjadi di beberapa wilayah desa, yang mengindikasikan bahwa meskipun sistem pengelolaan sampah melalui bank sampah telah tersedia, implementasinya di tingkat masyarakat belum berjalan secara maksimal karena kurangnya pengawasan dan enforcement yang konsisten dari pemerintah desa.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bulusulur masih bersifat informal, tidak terjadwal, dan belum terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk laporan tertulis yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa belum menetapkan standar operasional prosedur pengawasan yang mengatur tentang siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan, apa saja aspek yang harus

diawasi, bagaimana metode pengawasan yang digunakan, seberapa sering pengawasan dilakukan, serta bagaimana hasil pengawasan didokumentasikan dan ditindaklanjuti. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang baku menyebabkan pengawasan berjalan secara ad hoc dan sangat bergantung pada inisiatif personal aparatur desa tanpa adanya sistem yang menjamin konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Kondisi ini sejalan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh Siagian (2007) dan Terry (2006) yang menyatakan bahwa pengawasan yang efektif harus memenuhi tiga tahapan utama yaitu penetapan standar, pengukuran pelaksanaan, dan tindakan korektif, di mana dalam kasus Desa Bulusulur tahap pertama telah dilakukan melalui Peraturan Desa namun tahap kedua dan ketiga belum terlaksana secara optimal sehingga fungsi pengawasan kehilangan daya kontrolnya.

Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bulusulur dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah bersifat multidimensional dan saling terkait meliputi kendala struktural berupa keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa yang secara khusus menangani urusan lingkungan dan pengelolaan sampah, keterbatasan anggaran desa untuk mendukung kegiatan pengawasan seperti kunjungan lapangan rutin, pengadaan sarana monitoring, atau pemberian insentif bagi kader pengawas partisipatif, serta belum adanya mekanisme pengawasan yang baku dan terstruktur dalam sistem kerja pemerintahan desa. Kendala kultural berupa rendahnya kesadaran dan partisipasi sebagian masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah secara konsisten, kebiasaan lama membuang sampah dengan cara dibakar atau dibuang tanpa pemilahan yang masih mengakar, serta belum adanya sanksi sosial atau administratif yang tegas bagi warga yang tidak berpartisipasi dalam pengelolaan sampah sehingga tidak ada tekanan atau dorongan kuat untuk mengubah perilaku. Kendala kapasitas teknis dan manajerial berupa keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam melakukan monitoring dan evaluasi program berbasis masyarakat, keterbatasan kemampuan pengelola bank sampah dalam manajemen organisasi, pembukuan keuangan, dan pengembangan strategi

pemasaran produk daur ulang, serta belum adanya sistem dokumentasi dan informasi manajemen yang baik untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kendala koordinasi berupa lemahnya koordinasi vertikal dengan Pemerintah Kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang seharusnya memberikan dukungan teknis dan pembinaan berkelanjutan, serta koordinasi horizontal dengan lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, dan kelompok pemuda yang berpotensi menjadi mitra dalam pengawasan partisipatif namun belum dimobilisasi secara optimal.

Faktor pendukung pelaksanaan peran pemerintah desa meliputi adanya regulasi lokal berupa Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah yang memberikan landasan hukum dan legitimasi kelembagaan bagi pengelolaan bank sampah, keberadaan Bank Sampah Induk Bina Tata Praja yang telah berjalan dan memiliki pengurus yang berkomitmen menjalankan kegiatan meskipun dengan keterbatasan sumber daya, adanya sebagian masyarakat yang telah memiliki kesadaran lingkungan tinggi dan aktif berpartisipasi sebagai nasabah bank sampah yang dapat menjadi role model bagi warga lain, serta dukungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Wonogiri meskipun tidak rutin dalam bentuk pembinaan dan pelatihan yang pernah diberikan kepada pengurus bank sampah. Sementara itu, faktor penghambat yang paling dominan adalah keterbatasan sumber daya aparatur desa yang harus menangani berbagai bidang pekerjaan sehingga fungsi pengawasan lingkungan tidak dapat dilakukan secara fokus dan profesional, minimnya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pengawasan dan pengembangan bank sampah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, lemahnya koordinasi dan evaluasi berkala antara pemerintah desa dengan pengelola bank sampah serta antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, rendahnya kesadaran dan konsistensi partisipasi sebagian besar masyarakat dalam memilah dan menyetorkan sampah yang menyebabkan volume sampah yang masuk ke bank sampah masih fluktuatif, serta belum adanya enforcement atau penegakan sanksi yang tegas terhadap warga yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan sampah sebagaimana

diatur dalam Peraturan Desa sehingga regulasi kehilangan daya paksa dan tidak mampu mengubah perilaku masyarakat secara signifikan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Budiarto et al. (2024) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan bank sampah sangat dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara berkelanjutan di mana keberadaan regulasi lokal menjadi faktor penting namun efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi dan konsistensi pengawasan. Penelitian Anam dan Siwiendrayanti (2023) juga memperkuat temuan bahwa lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan bank sampah menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak berkelanjutannya program, sementara penelitian Tundjungsari et al. (2025) menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dalam bentuk monitoring rutin, evaluasi kinerja, dan penyediaan sarana pendukung untuk menjamin keberlanjutan bank sampah. Namun penelitian ini memberikan kontribusi tambahan berupa analisis mendalam terhadap kesenjangan antara kebijakan desa dan praktik pengawasan di lapangan dengan menggunakan kerangka teori peran Soekanto yang membagi peran menjadi peran pasif, partisipatif, dan aktif, sehingga dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang dinamika peran pemerintah desa dalam pengawasan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di tingkat lokal.

Implikasi dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan peran pemerintah desa dalam pengawasan pengelolaan sampah melalui bank sampah memerlukan pendekatan sistematis dan komprehensif yang mencakup reformasi kelembagaan dengan menetapkan secara jelas aparatur yang bertanggung jawab penuh terhadap bidang lingkungan hidup lengkap dengan uraian tugas yang spesifik dan terukur, reformulasi penganggaran dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk program lingkungan hidup minimal 5-7% dari total APBDes untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pengembangan kapasitas, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dengan menyusun standar operasional prosedur pengawasan, indikator kinerja bank sampah, dan format pelaporan yang

baku, penguatan koordinasi vertikal dengan pemerintah kabupaten untuk mengakses dukungan teknis dan sumber daya yang tersedia di tingkat kabupaten, pengembangan program edukasi dan kampanye lingkungan yang intensif untuk mengubah perilaku masyarakat secara bertahap, pembentukan sistem insentif dan disinsentif yang jelas untuk mendorong partisipasi masyarakat dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah, serta pengembangan kerjasama multi-pihak dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau sektor swasta untuk memperoleh dukungan teknis, pendampingan, dan sumber daya tambahan yang dapat mengatasi keterbatasan kapasitas pemerintah desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa Bulusulur dalam pengawasan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Induk Bina Tata Praja telah terbentuk secara normatif melalui penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah dan dukungan terhadap pendirian kelembagaan bank sampah, namun ketika dianalisis menggunakan teori peran Soekanto aktualisasi peran masih lebih dominan berada pada peran pasif dan partisipatif sementara peran aktif sebagai pengawas yang melakukan pemantauan sistematis, evaluasi terukur, dan tindakan korektif belum terwujud secara optimal. Pengawasan yang dilakukan masih bersifat administratif, tidak rutin, dan belum terstruktur dalam mekanisme yang baku sehingga fungsi pengawasan kehilangan daya kontrolnya dan belum mampu mendorong kepatuhan masyarakat serta profesionalitas manajemen bank sampah secara berkelanjutan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, minimnya alokasi anggaran khusus pengawasan, lemahnya koordinasi dan evaluasi berkala, rendahnya kesadaran sebagian warga, serta belum adanya enforcement sanksi yang tegas, sementara faktor pendukung mencakup keberadaan regulasi lokal, keberlangsungan Bank Sampah Induk Bina Tata Praja, serta dukungan warga yang telah memiliki kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah desa melalui pengawasan yang lebih terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan menjadi

kebutuhan strategis untuk memastikan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat mencapai tujuan lingkungan, ekonomi, dan sosial yang diharapkan dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Anam, S., & Siwiendrayanti, A. (2023). Analysis of Community-Based Waste Management through Waste Bank in Tinjomoyo Urban Village, Semarang City, Central Java. *Jurnal Presipitasi: Media Komunikasi Dan Pengembangan Teknik Lingkungan*, 20(3), 590-601.
- Budiyarto, A., Clarke, B., & Ross, K. (2024). Overview of waste bank application in Indonesian regencies. *Waste Management & Research*, 43(3), 306-321.
- Muchsin, H. S. (2021). *Implementasi kebijakan pengurangan risiko bencana*. Unisma Press.
- Siagian, S. P. (2007). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Terry, G. G. (2006). *Principles of Management (terjemahan)*.
- Tundjungsari, V., Putranto, B., Ulum, M., & Anwar, N. (2025). An Integrated Model for Circular Waste Management Using the Internet of Things, Semantic Web, and Gamification (Circonomy): Case Study in Indonesia. *JMIR Publications*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.